



E-ISSN: 2723-7664

Nivedana

Jurnal Komunikasi dan Bahasa

Volume 7 Number 1, January-March 2026



@ the Author(s) 2026

Submitted 08 Nov 2025

Revised 4 March 2026

Accepted 15 March 2026

<https://doi.org/10.53565/nivedana.v7i1.1956>

KONSTRUKSI REPRESENTASI SELEBRITAS POLITIK DALAM WACANA PELANTIKAN DEDDY CORBUZIER SEBAGAI STAF KHUSUS MENHAN DI TIKTOK

Said Shalman Asswat Almahdali¹, Dra. Dyva Claretta, M.Si¹.
corresponding author: 21043010031@student.upnjatim.ac.id

Abstract

The rapid development of social media, especially TikTok, has now become the main digital public space in Indonesia, mostly among the younger generation. TikTok not only functions as an entertainment medium but also as a dynamic space for discussion and public opinion formation. The phenomenon of the appointment of Deddy Corbuzier, a public figure with great influence in digital media, as Staffus Menhan has caused various reactions and narratives on TikTok. This research uses Rodney H. Jones' Digital Discourse Analysis approach to examine the interaction of text, digital context, action, and ideology that appear in TikTok users' videos and comments related to the inauguration discourse. The results showed that the narratives that developed were very diverse, ranging from support to criticism to satire. TikTok proved to be an important platform for people to express opinions, build discourse, and influence public perception of socio-political issues. This research emphasizes the strategic role of social media as an inclusive and participatory digital democratic space in today's political communication.

Keywords: Digital Discourse Analysis, Political Celebrity, TikTok

Abstrak

Pesatnya perkembangan media sosial, khususnya TikTok, yang kini menjadi ruang publik digital utama di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan pembentukan opini publik yang dinamis. Fenomena pengangkatan Deddy Corbuzier, seorang publik figur dengan pengaruh besar di media digital, sebagai Stafus Menhan menimbulkan berbagai reaksi dan narasi di TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones untuk mengkaji interaksi teks, konteks digital, aksi, dan ideologi yang muncul dalam video dan komentar pengguna TikTok terkait wacana pelantikan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi yang berkembang sangat beragam, mulai dari dukungan, kritik, hingga satir. TikTok terbukti menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini, membangun diskursus, dan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu sosial-politik. Penelitian ini menegaskan peran strategis media sosial sebagai ruang demokrasi digital yang inklusif dan partisipatif dalam komunikasi politik masa kini.

Kata Kunci: Analisis Wacana Digital, Selebritas Politik, TikTok

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui internet telah menciptakan ruang global tanpa batas yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi tanpa terikat ruang dan waktu (Sedana, 2020). Salah satu bentuknya adalah media online seperti portal berita, blog, dan media sosial, yang menjadi paling dominan karena akses mudah, penyampaian cepat, dan biaya relatif terjangkau (Miranda, 2017). Media sosial sebagai platform berbasis Web 2.0 memungkinkan pengguna menciptakan, membagikan, dan menanggapi konten secara aktif, sekaligus berperan penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik (Santosa, 2023). Karakternya yang terbuka dan interaktif menjadikan media sosial sebagai ruang publik yang lebih demokratis dan partisipatif, karena produksi pesan atau narasi tidak lagi dimonopoli media arus utama, tetapi juga oleh individu (Habermas dalam Supriadi, 2017).

TikTok merupakan platform video pendek yang diluncurkan oleh ByteDance pada 2017 dan memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif di Indonesia pada pertengahan 2024, menjadikannya negara dengan pengguna terbesar secara global, didominasi usia 18–34 tahun dengan rata-rata penggunaan 41 jam 35 menit per bulan (Makdori, 2024). Popularitasnya tidak hanya karena aspek hiburan, tetapi juga kemampuannya membentuk ruang publik digital melalui fitur komentar, *like*, *share*, *stitch*, dan duet yang mendorong interaksi kolektif dan diskusi terbuka (Suhendra & Pratiwi, 2024). Berbeda dengan platform lainnya, TikTok diperkuat algoritma *For You Page* (FYP), sehingga wacana sosial dan politik dapat menyebar cepat dan luas. Fenomena ini menegaskan peran TikTok sebagai ruang publik digital yang dinamis dalam membentuk opini dan narasi masyarakat.

Fenomena selebritas yang terjun ke politik semakin marak di Indonesia, di mana popularitas dimanfaatkan sebagai modal sosial dan politik untuk memperluas komunikasi publik, menandai pergeseran demokrasi yang tidak lagi didominasi tokoh partai atau birokrasi (Putri & Muradi, 2017). Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik mencerminkan strategi pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda, namun juga memicu perdebatan terkait kompetensi, pengalaman, dan legitimasi politiknya. Respon publik di TikTok menunjukkan dinamika politik digital yang berkembang dengan beragam opini mengenai kapasitas komunikasinya yang didukung rekam jejak sebagai Duta Komcad dan penerima pangkat Letkol Tituler, sekaligus kritik atas latar belakang non-militer dan

isu profesionalisme birokrasi. Perdebatan ini menegaskan ketegangan antara inovasi komunikasi politik dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang professional.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada Februari 2025 memicu diskursus luas di ruang digital, khususnya TikTok. Keterlibatannya sebelumnya sebagai duta Komponen Cadangan (2021) dan penerima pangkat Letnan Kolonel Tituler (2022) dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam edukasi pertahanan melalui media digital. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik terkait profesionalisme dan kebijakan efisiensi anggaran, dengan munculnya berbagai narasi di TikTok yang mempertanyakan kompetensi serta memandangnya sebagai strategi pencitraan politik, sehingga memunculkan perdebatan antara inovasi komunikasi dan tuntutan profesionalisme institusi negara.

Narasi terkait pelantikan tersebut viral di TikTok, menunjukkan kekuatan TikTok dalam menyebarluaskan wacana secara masif dan *real-time*. Narasi yang berkembang mencerminkan ketegangan antara profesionalisme birokrasi dan inovasi komunikasi berbasis selebritas, di mana interaksi digital tidak hanya merepresentasikan reaksi, tetapi juga membingkai ulang makna pelantikan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Algoritma personalisasi dan karakter interaktif yang mendorong narasi afektif dan multimodal, pembentukan persepsi publik terhadap legitimasi figur politik berlangsung melalui interpretasi kolektif pengguna, bukan semata dari pesan formal pemerintah.

Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan memicu diskursus luas di media sosial, terutama TikTok, yang kini menjadi ruang dominan dalam pembentukan opini publik. Sebagai platform yang didominasi generasi muda dan memiliki kemampuan penyebaran informasi secara cepat, TikTok menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan dukungan maupun kritik terhadap pelantikan tersebut. Narasi-narasi yang muncul dalam bentuk video pendek, komentar, dan interaksi lainnya yang menggambarkan kompleksitas penerimaan publik terhadap sosok Deddy yang berasal dari latar non-militer dan non-politik. Melalui video pendek dan interaksi digital, pengguna mengekspresikan dukungan maupun kritik, mencerminkan kompleksitas penerimaan terhadap latar belakang non-militer dan non-politiknya. TikTok pun bertransformasi dari media hiburan menjadi arena diskursif yang aktif dan partisipatif dalam konstruksi makna sosial-politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digital untuk mengkaji tanggapan masyarakat terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan melalui unggahan konten TikTok, dengan merujuk pada teori Rodney H. Jones yang mencakup dimensi teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan. Dalam hal ini TikTok dipahami sebagai ruang publik digital yang memungkinkan produksi, distribusi, dan konstruksi makna secara kolektif melalui video, komentar, dan fitur interaktif, sehingga wacana selebritas politik dipandang sebagai proses konstruksi sosial atas legitimasi, kredibilitas, dan relasi kekuasaan. Objek penelitian berupa lima konten TikTok dengan *engagement* tinggi dari akun @immakalean, @haidarakbar_, @kostumkomik.real, @fathianhafiz617, dan @winews_ yang diunggah pada Februari 2025 dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi (pencarian dengan kata kunci tertentu, pencatatan URL, akun, tanggal, *views*, *likes*, *shares*, komentar, transkripsi, caption, serta pengarsipan screenshot dan unduhan video) dan observasi non-partisipan. Data akan dianalisis secara sistematis berdasarkan empat dimensi analisis wacana digital untuk mengungkap makna, dinamika interaksi, serta posisi ideologis yang muncul dalam wacana pelantikan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones yang menelaah hubungan antara teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan dalam konten TikTok terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Dimensi teks menganalisis narasi verbal, transkrip ucapan, overlay teks, dan komentar; konteks mengkaji latar sosial, budaya, dan politik, dimensi tindakan dan interaksi melihat partisipasi pengguna melalui komentar sebagai praktik sosial-politik, sedangkan dimensi ideologi dan kekuasaan menelaah bagaimana konten merefleksikan atau menantang legitimasi dan representasi figur publik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap bagaimana TikTok sebagai ruang publik digital membentuk wacana tentang peran selebritas dalam struktur pemerintahan serta legitimasi kebijakan negara.

Teks

Narasi dalam video TikTok tentang pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menhan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dianalisis melalui unsur teks dalam wacana digital, yang mencakup representasi linguistik dan semiotik seperti tulisan, suara, dan video (Jones et al., 2015). Konten TikTok yang membahas pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan merupakan teks digital yang mengandung narasi dan ideologi tertentu serta dipengaruhi oleh fitur-fitur yang disediakan oleh platform tersebut yang memungkinkan cara-cara tertentu dalam membingkai peristiwa dan membentuk opini publik. Narasi dalam video-video tersebut umumnya mengangkat urgensi dari pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan, rekam jejak Deddy Corbuzier sebagai selebritas yang memasuki ranah pemerintahan, dan pelantikannya yang dilakukan pada saat kebijakan efisiensi anggaran.

Narasi Kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier



Gambar 1. Konten Terkait Kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier dari Pengguna TikTok @immakalean

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkokvrTt/>)

Konten TikTok dari akun @immakalean yang diunggah pada 12 Februari 2025 dengan durasi 2 menit 4 detik dan 641 ribu tayangan merupakan video kritik terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan, dengan menyoroti kredibilitas dan etika komunikasinya. Melalui fitur *stitch*, @immakalean menanggapi video Deddy Corbuzier yang berbicara kasar kepada anak-anak terkait program makan bergizi dengan kalimat “*kurang enak pala lu Pe-ayamnya*”, lalu mengaitkannya dengan kelayakan Deddy Corbuzier sebagai pejabat publik bidang komunikasi sosial. Narasi seperti “*Ini modelan Stafsus yang akan digaji oleh negara dari uang pajak masyarakat*” dan kritik lanjutan mengenai empati serta profesionalisme menunjukkan kekecewaan publik dan mempertanyakan standar moral jabatan tersebut. Teks dalam konten ini tidak hanya menjadi ekspresi personal, tetapi membangun posisi ideologis yang menggugat legitimasi Deddy sebagai selebritas politik, dengan menekankan bahwa modal sosial berupa popularitas dan pengaruh digital tidak otomatis menjadi legitimasi politik tanpa didukung kredibilitas, etika, dan integritas di ruang publik.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id



Gambar 2. Konten Terkait Kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier dari Pengguna TikTok @kostumkomik.real

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoBA8Xt/>)

Konten TikTok dari akun @kostumkomik.real yang diunggah pada 11 Februari 2024 dalam format komik berdurasi 15 detik dengan 8,4 juta tayangan menyajikan kritik satir terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan melalui empat panel visual berurutan yang menampilkan rekam jejak kontroversialnya, mulai dari pertanyaan tidak sopan kepada perempuan, pengangkatan sebagai Letkol Tituler, ucapan kasar kepada anak kecil, hingga penunjukan sebagai Stafsus Menhan. Narasi visual dengan teks seperti “*Diangkat Prabowo jadi Letkol Tituler*” dan “*Diangkat Prabowo jadi Stafsus Menhan*” membingkai pesan bahwa posisi strategis tersebut diperoleh bukan karena profesionalisme atau etika, melainkan karena kedekatan politik dan popularitas. Konten komik ini menggunakan framing visual dan teks untuk mempertanyakan kredibilitas, akuntabilitas, serta standar kompetensi jabatan publik, sekaligus merepresentasikan kritik kolektif di TikTok terhadap fenomena selebritas politik, di mana modal sosial berupa ketenaran dan jaringan dianggap lebih menentukan daripada pengalaman dan kapasitas profesional di bidang pertahanan.



Gambar 3. Terkait Konten Kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier dari pengguna TikTok @winews_

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoB5eUv/>)

Konten TikTok dari akun @winews_ yang diunggah pada 13 Februari 2025 berdurasi 1 menit 38 detik dengan 45 ribu *like*, 364 komentar, dan 1.079 kali dibagikan menghadirkan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

pembahasan pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan dengan pendekatan jurnalistik yang informatif, santai, dan relatif objektif. Video ini menguraikan alasan pemerintah mengangkat Deddy berdasarkan kepakaran komunikasi dan *engagement* media sosialnya yang luas sebagai nilai strategis dalam sosialisasi kebijakan pertahanan, sekaligus menyoroti kontroversi rekam jejaknya seperti ucapan kasar kepada anak-anak dan pertanyaan tidak pantas di podcast. Narasi penutup yang memberi kesempatan menunjukkan sikap evaluatif dan terbuka, di mana penerimaan tidak bersifat mutlak tetapi bergantung pada kinerja ke depan. Konten ini membingkai Deddy sebagai figur selebritas politik yang berada di antara dua kutub, di satu sisi sebagai aset komunikasi modern pemerintah, di sisi lain sebagai simbol kaburnya batas antara popularitas dan profesionalisme birokrasi, sehingga memunculkan keraguan publik terhadap konversi modal sosial menjadi legitimasi politik yang sah.

Teks terkait narasi kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier menunjukkan bahwa wacana di TikTok membangun dua arus narasi yang saling berseberangan. Di satu sisi, Deddy dipandang memiliki kekuatan komunikasi dan pengaruh digital yang besar sehingga dianggap relevan untuk membantu sosialisasi kebijakan pertahanan kepada publik, khususnya generasi muda. Namun di sisi lain, rekam jejak kontroversialnya, seperti penggunaan bahasa kasar dan pernyataan yang dinilai tidak etis, memunculkan keraguan terhadap kelayakan moral dan profesionalismenya sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Popularitas dan modal sosialnya di media digital tidak secara otomatis diterima sebagai legitimasi politik, sehingga memunculkan kritik bahwa jabatan publik seharusnya menuntut standar etika, kompetensi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi daripada sekadar ketenaran.

Narasi Kredibilitas dan Profesionalisme Deddy Corbuzier



Gambar 4. Konten Terkait Efisiensi Anggaran dan Kritik terhadap Kebijakan dari pengguna

TikTok @immakalean

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkokvrTt/>)

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Konten TikTok dari akun @immakalean yang diunggah pada 12 Februari 2025 dengan durasi 2 menit 4 detik dan 641 ribu tayangan menampilkan kritik tajam terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan dengan menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan efisiensi anggaran dan penambahan staf khusus. Dalam narasinya, pembuat konten mempertanyakan logika pengangkatan figur selebriti yang digaji dari uang pajak rakyat di tengah seruan penghematan anggaran, serta membandingkan praktik efisiensi di negara lain seperti Vietnam, Argentina, Amerika Serikat, dan China yang disebut mengurangi tenaga non-prioritas dan meningkatkan kualitas aparatur. Kritik disampaikan dengan bahasa lugas dan sarkastik, menegaskan bahwa penambahan posisi non-struktural dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan justru berpotensi menambah beban anggaran. Narasi ini merepresentasikan keresahan publik terhadap konsistensi, transparansi, dan prioritas kebijakan pemerintah, sekaligus memaknai Deddy sebagai simbol selebritas politik yang mencerminkan ketegangan antara popularitas digital dan tuntutan kompetensi serta profesionalisme dalam jabatan strategis pemerintahan.



Gambar 5. Konten Terkait Efisiensi Anggaran dan Kritik terhadap Kebijakan dari pengguna TikTok @haidarakbar_

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoBPUTk/>)

Konten TikTok dari akun @haidarakbar_ yang diunggah pada 11 Februari 2025 dengan durasi 1 menit 8 detik dan memperoleh 32 ribu *like*, 4.531 komentar, serta 1.980 kali dibagikan, menyampaikan kritik terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Narasi dalam video menilai keputusan tersebut sebagai sesuatu yang “*aneh bin ajaib*” karena pemerintah justru menambah pejabat baru saat publik mempertanyakan efektivitas pemangkasan anggaran. @haidarakbar_ berpendapat bahwa efisiensi seharusnya dimulai dari penyusutan kabinet dan pengurangan struktur birokrasi yang dianggap gemuk, bukan menambah posisi baru yang tetap memerlukan anggaran operasional, meskipun ia mendukung pemangkasan pada pengeluaran administratif yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan rapat yang tidak esensial. Dengan gaya bahasa informal dan humoris seperti “*om-om botak yang*

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

punya podcast”, konten ini menggabungkan kritik dan satire untuk menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah, sekaligus merepresentasikan Deddy sebagai simbol politik selebritas yang lebih mengandalkan citra dan popularitas dibanding kompetensi substantif, serta mencerminkan meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap transparansi, konsistensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan kebijakan publik.



Gambar 6. Konten Terkait Efisiensi Anggaran dan Kritik terhadap Kebijakan dai pengguna TikTok
@fathianhafiz617

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoByQem/>)

Konten TikTok dari akun @fathianhafiz617 yang diunggah pada 14 Februari 2025 mengkritik pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski Deddy menyatakan tidak mengambil gaji atau tunjangan, kreator menilai persoalan utamanya adalah penambahan jabatan yang tetap menyerap anggaran melalui fasilitas dan privilese pejabat. Dengan narasi seperti “*kalau ngomongin efisiensi dipotongnya itu dari atas dulu bukan dari bawah*” Ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya dimulai dari pemangkasan pejabat tingkat atas, bukan masyarakat. Dengan bahasa tegas dan emosional, konten ini membongkai pernyataan Deddy sebagai pencitraan dan merepresentasikannya sebagai selebritas politik yang mengandalkan popularitas, sementara publik menuntut konsistensi dan transparansi anggaran.



Gambar 7. Konten Terkait Efisiensi Anggaran dan Kritik terhadap Kebijakan dai pengguna TikTok
@winews_

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoB5eUv/>)

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Konten TikTok akun @winews_ yang diunggah pada 13 Februari 2025 menyoroti isu efisiensi anggaran dalam kaitannya dengan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan, dengan menampilkan informasi mengenai kisaran gaji eselon IB sebesar Rp3,8–6,3 juta serta tunjangan kinerja hingga Rp27,5 juta untuk membangun persepsi tentang beban anggaran negara. Meskipun pengangkatan lima staf khusus sah secara hukum berdasarkan Perpres, narasi video mempertanyakan apakah seluruh kuota tersebut perlu diisi di tengah kebijakan efisiensi yang diselenggarakan pemerintah, sehingga membingkai kebijakan ini sebagai potensi ketidak konsistenan antara wacana efisiensi dan praktik birokrasi. Dalam konteks ini, Deddy direpresentasikan sebagai simbol selebritas yang memasuki ruang birokrasi, memunculkan perdebatan antara nilai strategis popularitas dan komunikasi publik dengan tuntutan rasionalitas, transparansi, dan efisiensi dalam kebijakan anggaran negara.

Teks pada narasi efisiensi anggaran dan kritik terhadap kebijakan, menunjukkan bahwa pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan memicu kritik tajam di TikTok karena dinilai tidak selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berbagai konten menyoroti bahwa penambahan staf khusus, meskipun sah secara hukum dan bahkan diklaim tanpa mengambil gaji, tetap dianggap menambah beban anggaran melalui fasilitas dan struktur birokrasi yang melekat pada jabatan tersebut. Kritik publik berfokus pada ketidak konsistenan pemerintah yang di satu sisi menyerukan penghematan, namun di sisi lain tetap memperluas struktur pejabat non-struktural. Narasi ini merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap transparansi, prioritas kebijakan, dan kecenderungan penggunaan jabatan strategis sebagai bagian dari pencitraan politik di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran secara rasional dan akuntabel.

Narasi Politisasi Selebritas dan Representasi Kekuasaan



Gambar 8. Politisasi Selebritas dan Representasi Kekuasaan dari pengguna TikTok

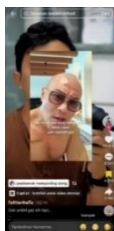
@kostumkomik.real

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoBA8Xt/>)

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Konten TikTok @kostumkomik.real yang dipublikasikan pada 11 Februari 2024 menampilkan kritik sosial berbentuk komik digital empat panel terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan, dengan menyandingkan rekam jejak kontroversialnya seperti pertanyaan tidak senonoh kepada perempuan dan ucapan kasar kepada anak kecil dengan pengangkatannya sebagai Letkol Tituler dan Stafsus Menhan. Melalui teks visual satir seperti “Dulu, habis memberi pertanyaan tak senonoh ke perempuan” dan “Diangkat Prabowo jadi Stafsus Menhan”, konten ini membangun narasi bahwa tindakan kontroversial tidak menjadi hambatan untuk memperoleh jabatan strategis. Format multimodal yang memadukan gambar dan teks memperkuat kritik terhadap politisasi selebritas, dengan menggambarkan Deddy sebagai simbol pergeseran standar pengangkatan pejabat dari berbasis kompetensi dan integritas menuju popularitas dan kedekatan politik, sehingga merepresentasikan kekuasaan yang lebih mengutamakan citra dibandingkan profesionalisme.



Gambar 9. Politisasi Selebritas dan Representasi Kekuasaan dari pengguna TikTok
@fathianhafiz617

(Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSkoByQem/>)

Konten TikTok @fathianhafiz617 yang diunggah pada 14 Februari 2025 menampilkan kritik terhadap representasi kekuasaan dalam sistem politik Indonesia dengan menyoroti pernyataan Deddy Corbuzier yang mengaku tidak mengambil gaji atau tunjangan sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Melalui narasi tegas seperti “*iya we fucking know it*”, kreator menilai klaim tersebut sebagai strategi pencitraan klasik selebritas untuk membangun kesan pengabdian tulus, bukan bukti integritas. Video ini menekankan bahwa bagi figur kaya, motivasi memasuki ranah politik bukan lagi soal uang, melainkan power yakni akses, pengaruh, kemudahan bisnis, dan status sosial. Perbandingan dengan tokoh seperti Donald Trump dan Elon Musk serta kutipan pernyataan Prabowo tentang pentingnya kekuasaan dalam kelancaran bisnis memperkuat argumen bahwa kekuasaan adalah instrumen strategis untuk memperluas kepentingan. Secara keseluruhan, konten ini tidak hanya mengkritik individu, tetapi juga membongkar relasi antara kekayaan,

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

selebritas, dan kekuasaan dalam politik digital, dengan memaknai Deddy Corbuzier sebagai simbol politisasi selebritas yang mencari akses dan kontrol, bukan semata pengabdian publik.

Teks pada bagian narasi politisasi selebritas dan representasi kekuasaan, menyoroti bahwa pelantikan Deddy Corbuzier merefleksikan pemanfaatan popularitas selebritas sebagai modal politik dalam membangun legitimasi dan menjangkau opini publik di era digital. Konten-konten di TikTok menggambarkan bagaimana citra, kedekatan dengan tokoh elite, dan daya tarik media sosial menjadi faktor penting dalam memperoleh posisi strategis, meskipun rekam jejak profesional dan etika tetap diperdebatkan. Narasi yang berkembang menunjukkan adanya ketegangan antara legitimasi berbasis kompetensi birokrasi dan legitimasi berbasis popularitas, sehingga memunculkan kritik bahwa kekuasaan kini semakin direpresentasikan melalui logika viralitas dan citra publik, bukan semata-mata pada kapasitas dan integritas substantif.

Konteks

Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan pada 11 Februari 2025 menjadi fenomena politik digital yang memicu pro dan kontra di TikTok sebagai ruang publik digital dominan di Indonesia. Pengangkatannya didasarkan pada latar belakangnya sebagai selebritas dengan pengaruh besar di media sosial, pengalaman sebagai Duta Komponen Cadangan sejak 2021, serta penerimaan pangkat Letkol Tituler pada 2022, dengan tujuan memperkuat komunikasi kebijakan pertahanan kepada generasi muda. Namun, pelantikan ini menuai kritik karena terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta mempertanyakan profesionalisme dan kapabilitasnya di bidang pertahanan, terutama akibat rekam jejak kontroversialnya di media sosial. Wacana di TikTok berkembang melalui fitur seperti video pendek, komentar, *Stitch*, dan duet yang mempercepat interaksi dan polarisasi opini, sementara algoritma *For You Page* (FYP) memperluas penyebaran narasi berdasarkan tingkat *engagement*, sehingga memperkuat peran TikTok dalam membentuk diskursus publik terkait isu tersebut (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menhan merepresentasikan fenomena selebritas politik di Indonesia, di mana popularitas dan pengaruh media sosial menjadi modal utama untuk memasuki jabatan publik, menggantikan paradigma politik berbasis kompetensi dan keahlian teknis. Kehadirannya menunjukkan kontradiksi demokrasi yang di satu sisi mencerminkan keterbukaan akses kekuasaan, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran bahwa jabatan diberikan atas dasar loyalitas dan pencitraan. Penunjukan ini juga terjadi di tengah kebijakan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga memicu kritik soal konsistensi pemerintah. Di TikTok, wacana pelantikan berkembang secara afektif dengan dominasi emosi publik, sejalan dengan konsep *affective public*, serta didorong budaya politik digital yang partisipatif dan interaktif melalui fitur seperti *Stitch*, duet, dan komentar (Arimardani, 2020). Fenomena ini menandai kaburnya batas antara hiburan dan politik serta menunjukkan bagaimana selebritas dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dan kontrol narasi dalam budaya politik digital Indonesia.

TikTok menjadi arena utama perdebatan publik terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan, dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif di Indonesia, sehingga berfungsi sebagai ruang publik digital yang dinamis dan interaktif dalam membentuk opini politik. Melalui algoritma FYP yang mempersonalisasi konten berdasarkan interaksi pengguna, isu ini cepat viral dan menjangkau audiens luas, memunculkan polarisasi opini dalam berbagai format seperti video opini personal (@immakalean), kritik informal kebijakan (@haidarakbar_), meme komik satir (@kostumkomik.real), diskusi duet bernuansa struktural (@fathianhafiz617), hingga konten semi-jurnalistik informatif (@winews_). Beragam konten ini mempertanyakan legitimasi selebritas dalam jabatan strategis serta konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus menunjukkan transformasi komunikasi politik dari model terpusat menuju pola yang lebih partisipatif, kreatif, dan demokratis di ruang digital (Harianja dalam Azzahra et al., 2025).

Fitur-fitur TikTok seperti editing (teks, efek visual, audio, caption, tagar), durasi video singkat, serta format multimodal memungkinkan pengguna mengonstruksi narasi visual yang kuat terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan, termasuk menciptakan kontras antara citranya sebagai entertainer dan posisinya sebagai pejabat publik, seperti pada konten komik @kostumkomik.real. Fitur interaksi seperti *like*, komentar, dan *share* berfungsi sebagai validasi sosial sekaligus arena diskusi kolektif yang memperlihatkan polarisasi opini publik. Sementara itu, fitur *stitch* dan Duet memungkinkan pengguna membangun narasi tandingan dengan menanggapi langsung video Deddy, sebagaimana dilakukan @immakalean dan @haidarakbar_. Di sisi lain, algoritma *For You Page* (FYP) mempercepat penyebaran konten berdasarkan *engagement*, cenderung memprioritaskan konten kontroversial, sehingga memperkuat polarisasi dan menciptakan echo chamber dalam wacana digital terkait pelantikan tersebut (Akbar et al., 2024).

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Tindakan dan Interaksi

Analisis wacana digital menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks praktik sosial dan interaksi keseharian (Jones et al., 2015). TikTok, sebagai platform digital populer, menyediakan medium bagi pengguna untuk membentuk makna melalui fitur interaktif seperti *likes*, komentar, dan *share*. Konten mengenai pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan dimaknai dan didistribusikan oleh pengguna TikTok, serta bagaimana praktik digital tersebut mencerminkan dinamika interaksi sosial dan konstruksi identitas dalam ruang virtual.

Fitur *like* di TikTok berfungsi tidak hanya sebagai indikator kesukaan, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi dan partisipasi politik yang memperkuat serta memvalidasi narasi tertentu terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menhan. Tingginya jumlah *like* pada konten seperti @immakalean (92 ribu), @kostumkomik.real (548 ribu), dan @fathianhafiz617 (114 ribu) menunjukkan adanya dukungan kolektif terhadap narasi kritik sekaligus mencerminkan polarisasi opini publik. Karena algoritma TikTok menjadikan *like* sebagai sinyal relevansi untuk distribusi konten di FYP, konten dengan *like* tinggi memperoleh visibilitas lebih luas dan menciptakan efek amplifikasi yang memperkuat narasi dominan, khususnya kritik terhadap pelantikan tersebut (Azzahra et al., 2025). Dengan demikian, *like* menjadi bentuk komunikasi non-verbal yang merepresentasikan afiliasi politik, memperkuat identitas kelompok, serta membentuk komunitas virtual berdasarkan sikap pro dan kontra tanpa harus selalu terlibat dalam interaksi komentar.

Dimensi tindakan dan interaksi terlihat pada polarisasi komentar pro dan kontra, di mana pendukung menilai pengangkatan Deddy sah dan kompeten dalam komunikasi publik, sementara pihak kontra mempertanyakan urgensi dan kompetensinya di tengah efisiensi anggaran; melalui sarkasme, satire, dan simbol digital, pengguna saling merespons secara aktif, menunjukkan TikTok sebagai ruang publik partisipatif yang membentuk makna kolektif serta memperluas perdebatan ke isu legitimasi politik dan prioritas pemerintahan (Firdaus et al., 2024).



Gambar 10. Komentar Mendukung (Sumber: tiktok.com)

Komentar mendukung pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di TikTok terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu penegasan bahwa Deddy tidak mengambil gaji sebagai bentuk pengabdian kepada negara, argumen bahwa pelantikannya tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran karena belanja pegawai tidak termasuk pos yang dipangkas, serta penilaian bahwa Deddy cerdas dan kredibel dalam bidang komunikasi publik. Pendukung menggunakan pernyataan resmi dan rekam jejak digital Deddy Corbuzier untuk membangun narasi positif, menekankan integritas, profesionalisme, serta kemampuannya menjangkau publik luas sebagai alasan kelayakan. Narasi ini memosisikan Deddy sebagai selebritas politik yang tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga dianggap memiliki kompetensi dan kontribusi nyata dalam memodernisasi komunikasi pertahanan, sehingga memperkuat legitimasi pelantikannya di ruang publik digital.



Gambar 11. Komentar Kritik (Sumber: tiktok.com)

Komentar penolakan dan kritik terhadap pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di TikTok terbagi dalam empat kategori utama, yaitu kritik terhadap pengangkatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak konsisten, pertanyaan mengenai urgensi dan relevansi posisi staf khusus, sorotan terhadap rekam jejak serta kontroversi pribadi Deddy, dan kritik atas latar belakang profesinya yang dinilai tidak sesuai dengan bidang pertahanan. Komentar-komentar tersebut menunjukkan kekhawatiran publik terhadap prioritas anggaran, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta ekspektasi bahwa jabatan strategis harus diisi berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, bukan popularitas. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya sikap kritis masyarakat di ruang digital, di mana Deddy dipandang sebagai simbol selebritas politik yang memicu perdebatan tentang legitimasi, integritas, dan standar kelayakan dalam pemerintahan.



Gambar 12. Komentar Terkait Konteks di Luar Pelantikan Deddy Corbuzier (Sumber: tiktok.com)

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Komentar di luar konteks langsung pelantikan Deddy Corbuzier berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap sistem pemerintahan dan kepemimpinan Presiden Prabowo. Pada kategori kritik terhadap sistem pemerintahan, pengguna TikTok mempertanyakan kualitas birokrasi, proses rekrutmen pejabat yang dinilai lebih mengutamakan popularitas daripada kompetensi, serta inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pelantikan Deddy dipandang sebagai simbol problem struktural dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, pada kategori kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, komentar menyoroti ketidaksesuaian antara wacana penghematan anggaran dan praktik pembagian jabatan, disertai ekspresi emosional seperti kemarahan, kekecewaan, hingga harapan agar kepemimpinan lebih bijak. Fenomena ini menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi arena diskursif yang melampaui isu personal Deddy Corbuzier dan berkembang menjadi ruang publik digital untuk menyuarakan ketidakpuasan, kritik sistemik, serta kontestasi makna terhadap kebijakan dan arah kepemimpinan nasional.



Gambar 13. Ekspresi Dalam Komentar (Sumber: tiktok.com)

Komentar terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di TikTok menunjukkan pola gaya komunikasi yang khas, seperti sindiran terhadap profesionalisme jabatan, satir terhadap praktik kekuasaan, dan penggunaan simbol-simbol digital untuk mengekspresikan emosi. Sindiran digunakan untuk mempertanyakan kredibilitas dan kesesuaian latar belakang Deddy dengan jabatan strategis di bidang pertahanan, sering melalui analogi dan sarkasme. Satir dimanfaatkan sebagai bentuk kritik sosial yang humoris terhadap dinamika kekuasaan dan dugaan praktik nepotisme, sehingga pesan kritik lebih mudah diterima dan viral. Selain itu, emotikon seperti 😏 dan 🖤 menjadi sarana komunikasi non-verbal yang menyiratkan sinisme, kekecewaan, atau penguatan makna tertentu. Interaksi di kolom komentar berlangsung aktif dan dua arah, dengan pengguna saling membalas, berdebat, dan membangun percakapan kolektif, menunjukkan bahwa TikTok telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang partisipatif, di mana pengguna tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi agen sosial yang membentuk narasi dan opini

politik secara bersama-sama. Fitur *share* di TikTok berperan penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas konten pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan, karena setiap tindakan berbagi dinilai algoritma sebagai sinyal viralitas yang mendorong video lebih sering muncul di *For You Page*. Sharing tidak hanya berfungsi sebagai distribusi informasi, tetapi juga mempercepat pembentukan diskursus publik dengan menjangkau audiens baru, meningkatkan watch time dan *engagement rate*, serta memicu lonjakan interaksi seperti *like* dan komentar. Proses ini memungkinkan pengguna berpartisipasi aktif dalam konstruksi wacana politik tanpa melalui media arus utama, sehingga fitur *share* menjadi mekanisme demokratisasi informasi yang memperkaya perspektif dan memperluas partisipasi dalam perdebatan mengenai legitimasi selebritas dalam struktur pemerintahan (Isya et al., 2024).

Ideologi dan Kekuasaan

Wacana tidak hanya merepresentasikan realitas sosial, tetapi juga memengaruhi struktur kekuasaan antar individu dan kelompok (Jones et al., 2015). Transformasi diskursus kekuasaan di era digital melalui TikTok menunjukkan pergeseran komunikasi politik dari model tradisional yang elitis menjadi lebih partisipatif dan demokratis, di mana pengguna biasa dapat memproduksi dan mempengaruhi wacana publik terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan (Nofiard, 2022). Kekuasaan simbolik tidak lagi terpusat pada institusi formal, tetapi juga tersebar pada aktor digital yang mampu memobilisasi *engagement* dan memanfaatkan algoritma sehingga narasi pro maupun kontra dapat menjangkau jutaan tayangan. TikTok menjadi arena reproduksi ideologi dan perebutan legitimasi, di mana wacana pro menekankan modernisasi dan kompetensi komunikasi Deddy sebagai strategi adaptif pemerintah, sementara wacana kontra menyoroti pentingnya profesionalisme dan menolak konversi popularitas menjadi otoritas politik. Dinamika ini mencerminkan polarisasi ideologis tentang relasi antara popularitas dan kekuasaan serta menunjukkan vitalitas sekaligus ketegangan ruang publik digital dalam demokrasi Indonesia (Kuncoro et al., 2019).

Konstruksi ideologi selebritas politik dalam pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di TikTok menunjukkan pergeseran dari politik berbasis kompetensi ke politik berbasis popularitas, di mana kepopuleran dan daya jangkau media sosial menjadi sumber legitimasi politik (Suhendra & Pratiwi, 2024). Wacana yang berkembang memperlihatkan kontestasi antara ideologi profesionalisme yang menuntut kesesuaian kompetensi dengan jabatan strategis, dan ideologi

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

populisme digital yang menganggap kemampuan komunikasi serta kedekatan emosional sebagai aset politik sah di era media sosial. TikTok menjadi arena perebutan legitimasi antara kekuasaan formal pemerintah dan kekuasaan simbolik pengguna digital, di mana legitimasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan resmi, tetapi juga oleh tingkat *engagement*, viralitas, dan validasi sosial. Dinamika ini mencerminkan transformasi politik Indonesia yang semakin dipengaruhi logika media sosial, serta memperlihatkan kompleksitas relasi antara popularitas, profesionalisme, dan otoritas dalam demokrasi digital.

Penyebaran kekuasaan di TikTok terkait pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Menhan menunjukkan ketimpangan digital, di mana konten dengan *engagement* tinggi memperoleh visibilitas lebih besar melalui algoritma dan berpengaruh dominan dalam membentuk opini publik (Firdaus et al., 2024). Legitimasi politik tidak lagi hanya bergantung pada otoritas formal pemerintah, tetapi juga pada kemampuan meraih dukungan digital dan viralitas, seperti terlihat pada konten satir @kostumkomik.real yang meraih ratusan ribu *like* dan jutaan views sehingga memperkuat narasi kritik. Pengguna TikTok berperan sebagai agen aktif yang menciptakan narasi tandingan melalui fitur *stitch*, duet, dan komentar, sebagaimana dilakukan @immakalean dan @fathianhafiz617, yang menunjukkan bahwa kekuasaan politik di era digital bersifat terdistribusi, partisipatif, dan menjadi arena kontestasi antara wacana resmi dan legitimasi alternatif di ruang publik digital .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana digital terhadap narasi selebritas politik pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan di TikTok, penelitian ini menemukan tiga narasi utama, yaitu narasi kredibilitas dan profesionalisme yang menyoroti kontradiksi antara popularitas media sosial dan tuntutan kompetensi teknis jabatan strategis serta mempertanyakan relevansi latar belakang dan rekam jejaknya, narasi efisiensi anggaran dan kritik kebijakan yang mengekspos ketidaksesuaian antara wacana penghematan pemerintah dan pengangkatan pejabat non-struktural baru sehingga memunculkan diskursus tentang prioritas pengelolaan keuangan negara, serta narasi politisasi selebritas dan representasi kekuasaan yang menunjukkan pergeseran legitimasi politik dari berbasis profesionalisme menuju berbasis popularitas digital, di mana modal berupa popularitas, jangkauan audiens, dan *engagement* media sosial dimaknai lebih bernilai

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

daripada keahlian teknis atau pengalaman birokrasi. TikTok dipahami telah bertransformasi dari platform hiburan menjadi ruang publik digital yang dinamis, partisipatif, dan multidimensional, berfungsi sebagai arena kontestasi legitimasi politik melalui fitur interaktif dan algoritma yang mendistribusikan visibilitas berdasarkan *engagement*, sekaligus memfasilitasi polarisasi komunitas dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini berkontribusi bagi kepentingan publik dengan memberikan pemahaman kritis mengenai peran media sosial dalam pembentukan opini politik, mendorong literasi digital masyarakat, serta menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih transparan, profesional, dan responsif dalam merancang kebijakan dan strategi komunikasi publik di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., Rizky, A., Hukum, F., Kendari, U. M., Hukum, F., & Oleo, U. H. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Arimardani, A. F. (2020). *News Comment di Portal Berita pada Suasana Politik Menjelang Pemilu 2019 (Analisis Sentimen Terhadap Isi Kolom Komentar Portal Berita CNN Indonesia)* [Universitas Multimedia Nusantara]. <https://kc.umn.ac.id/id/eprint/13084/>
- Azzahra, A. N., Kuswanti, A., Sekarningrum, A. A., Ari Sulistyanto, Rahayunianto, A., AskaLeonardi, Meidina, A. P., Fitrianti, A., Azmi, B. F., Bangun, C. R. A., Astari, D. W., Soelistyowati, D., Intyaswati, D., Kartikawati, D., Prasetyo, D., Dwinarko, Wirawan, F. W., Hariyati, F., Bilqis, F., ... Sa'idah, Z. (2025). *Transformasi Komunikasi Digital Menuju Indonesia Berkelanjutan: Komunikasi Digital dan Dinamika Budaya* (R. Agustinus Rusdianto Berto, Safrudiningsih, Ayu Lestari, Latifa Ramonita, Tatik Yuniarti, Adinda Arifiah (ed.)). PT Elex Media Komputindo. http://repository.starki.id/id/eprint/544/1/Buku_4_Komunikasi_Digital_dan_Dinamika_Budaya_compressed.pdf#page=22
- Firdaus, S., Naila, N., Pramesti, A. D., Sari, C. K., & Azzahra, D. F. (2024). *Tiktok Sebagai Media Sosial dalam Melakukan Kritik terhadap Pembangunan di Lampung*. 6, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1882>
- Isya, N., Ahsan, A., & Nuraeni, R. (2024). Pengaruh Fitur Posting Ulang (Repost) Terhadap Kepuasan Penggunaan Tiktok pada Gen Z di Indonesia. *E-Proceeding of Management*, 11(6), 6879–6887. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/25098>
- Jones, R. H., Chik, A., & Hafner, C. A. (2015). Discourse Analysis and Digital Practices. In R. H. Jones, A. Chik, & C. A. Hafner (Eds.), *Discourse and Digital Practices: Doing discourse analysis in the digital age* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315726465-5>
- Kuncoro, H. R., Sari, D. L., Hasanah, K., & Kurniawati, E. (2019). Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial. In K. Hasanah, H. R. Kuncoro, & D. L. Sari (Eds.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). LPPM

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 7, Number 1, Jan-March 2026 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- UPNVY Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Makdori, Y. (2024). *Habiskan Waktu Paling Lama, Orang Indonesia Dinobatkan Paling Doyan Nonton TikTok*. Asumsi.Co. <https://asumsi.co/post/97759/habiskan-waktu-paling-lama-orang-indonesia-dinobatkan-paling-doyan-nonton-tiktok/>
- Miranda, S. (2017). Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1–15. <https://www.neliti.com/publications/118440/pengaruh-instagram-sebagai-media-online-shopping-fashion-terhadap-perilaku-konsu#cite>
- Nofiard, F. (2022). *Komunikasi Politik Digital di Indonesia*. 10(2), 31–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Putri, D. T. E., & Muradi. (2017). Popularitas selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 103–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12640>
- Santosa, D. R. (2023). Digital Discourses Mengenai Fenomena Cancel Culture Saipul Jamil dalam Media Sosial TikTok. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3411>
- Sedana, I. M. S. I. N. (2020). Mempertahankan Eksistensi Media Cetak Di Tengah Gempuran Media Online. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 01, 56–64. <https://doi.org/10.54895/jkb.v1i1.314>
- Suhendra, & Pratiwi, F. S. (2024). *Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial*. 293–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*, 1, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkj.v1i1.12228>